Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 11 No. 4 Tahun 2026, pp. 1112 – 1129
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i4.7751
■ Received 19/09/2026 ■ Revised 21/10/2026 ■ Accepted 21/10/2026

Evaluation of the "LELADI SESAMI" Program in Madiun Regency: An Analysis of Challenges and Successes Using the CIPP Model

Faniza Kurnia Syahida[1*], Yuyun Eka Kartika Sari[1]
[1)] Program Studi D4 Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya
Surabaya, Indonesia

Email correspondence : faniza.23044@mhs.unesa.ac.id*

Abstract

Purpose: This study aims to evaluate the challenges and successes of the "LELADI SESAMI" program (*Mobile Population Administration Services Every Saturday and Sunday*) in Madiun Regency using the CIPP model (*Context, Input, Process, Product*).

Design/methodology/approach: This study employs a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation to examine program needs, resource availability, implementation processes, and service outcomes.

Findings: The findings indicate that the "LELADI SESAMI" program addresses community needs and is supported by available personnel, operational funding, and service equipment. However, implementation still faces challenges, including limited facilities for people waiting in queues, schedule adjustments through Wednesday services (*Reboan*), and variations in service locations. The number of services decreased from 7,729 in 2024 to 6,839 in 2025, despite an increase in activities from 40 to 42. Meanwhile, the *request by desa* mechanism helps bring services closer to communities according to local needs.

Practical Implication: The findings can inform the Madiun Regency Population and Civil Registration Office in improving service facilities, reviewing service schedules and locations, and strengthening program performance monitoring.

Originality/value: This study evaluates a population administration service innovation through the four CIPP dimensions, highlighting schedule adjustments, village-based service requests, and changes in service outcomes.

Keywords: Program Evaluation, CIPP Model, Public Service Innovation, Mobile Services, Population Administration.

Paper type: Research Paper.

Copyright (c) 2026 The Author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Disclosure statement: The authors do not have any conflict of interest

Evaluasi Program "LELADI SESAMI" di Kabupaten Madiun: Analisis Hambatan dan Keberhasilan dengan Model CIPP

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hambatan dan keberhasilan Program "LELADI SESAMI" (*Keliling Melayani Administrasi Kependudukan Setiap Sabtu dan Minggu*) di Kabupaten Madiun menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan program, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil pelayanan.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program "LELADI SESAMI" sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh ketersediaan petugas, anggaran, serta peralatan pelayanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan fasilitas bagi masyarakat yang mengantre, perubahan jadwal melalui Reboan, dan variasi lokasi pelayanan. Jumlah pelayanan menurun dari 7.729 pada 2024 menjadi 6.839 pada 2025, meskipun jumlah kegiatan meningkat dari 40 menjadi 42. Di sisi lain, mekanisme *request by desa* membantu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan wilayah.

Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dispendukcapil Kabupaten Madiun untuk memperbaiki fasilitas, mengevaluasi jadwal dan lokasi pelayanan, serta meningkatkan pemantauan capaian program.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini memberikan evaluasi terhadap inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui empat dimensi CIPP, dengan menyoroti penyesuaian jadwal, mekanisme pengajuan pelayanan oleh desa, dan perubahan capaian pelayanan.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Model CIPP, Inovasi Pelayanan Publik, Pelayanan Keliling, Administrasi Kependudukan.

Jenis Penelitian: Artikel Penelitian.

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola pemerintahan menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayahnya. Salah satu bentuk pelayanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, sehingga kemudahan dalam memperolehnya menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan pola pelayanan yang tidak hanya berpusat di kantor, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat secara lebih dekat.

Pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat serta mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Mozin et al., 2026). Kualitas pelayanan juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memahami dan menanggapi kebutuhan masyarakat (Shalsabella et al., 2025). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan inovasi pelayanan yang menyesuaikan mekanisme pelayanan dengan kondisi di lapangan (Salam, 2023). Dalam administrasi kependudukan, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan jemput bola, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat agar pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri memiliki peran penting dalam pemenuhan hak administratif masyarakat dan akses terhadap berbagai pelayanan publik (Sumartini et al., 2024).

Dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah dijangkau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun mengembangkan Program LELADI SESAMI (Keliling Melayani Adminduk Setiap Sabtu dan Minggu) pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor 188/755/KPTS/402.101/2023. Program ini dibentuk sebagai alternatif pelayanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan pada hari kerja. Melalui pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu, LELADI SESAMI diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memperluas akses pelayanan.

Sejak dilaksanakan, LELADI SESAMI tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Pelayanan yang semula dijadwalkan pada hari

Sabtu dan Minggu pada beberapa kondisi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga dilakukan penyesuaian melalui Reboan, yaitu pelayanan pada hari Rabu sebagai pengganti jadwal yang tidak terlaksana. Selain penyesuaian jadwal, pemerintah desa juga dapat mengajukan permohonan pelayanan kepada Dispendukcapil Kabupaten Madiun ketika terdapat kebutuhan administrasi kependudukan di wilayahnya. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan sesuai waktu dan lokasi yang diajukan oleh desa. Pola pelaksanaan LELADI SESAMI pada hari Sabtu, Minggu, dan Reboan selama tahun 2024 dan 2025 disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Pelaksanaan Berdasarkan hari Pelayanan Tahun 2024 – 2025

Bulan	Tahun 2024				Tahun 2025			
	Sabtu	Minggu	Rabu	**Total**	Sabtu	Minggu	Rabu	**Total**
Januari	4	4	0	**8**	0	1	2	**3**
Februari	1	1	0	**2**	0	2	2	**4**
Maret	1	1	0	**2**	0	2	1	**3**
April	0	0	0	**0**	0	3	2	**5**
Mei	0	0	0	**0**	0	1	3	**4**
Juni	0	4	0	**4**	0	1	2	**3**
Juli	0	1	0	**1**	0	1	1	**2**
Agustus	1	2	4	**7**	0	1	2	**3**
September	0	4	1	**5**	1	1	2	**4**
Oktober	0	1	4	**5**	1	1	2	**4**
November	0	2	2	**4**	1	0	2	**3**
Desember	0	2	0	**2**	2	0	2	**4**
Total	**7**	**22**	**11**	**40**	**5**	**15**	**23**	**42**

Sumber: Data Pelayanan LELADI SESAMI, Dispendukcapil Kabupaten Madiun (diolah peneliti)

Berdasarkan data pelaksanaan LELADI SESAMI tahun 2024 dan 2025, pelayanan belum terlaksana secara konsisten setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, tidak terdapat pelaksanaan pada April dan Mei, sedangkan frekuensi tertinggi terjadi pada Januari dengan delapan kali pelayanan. Sementara itu, pada tahun 2025 frekuensi pelayanan berada pada kisaran dua hingga lima kali dalam sebulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan LELADI SESAMI masih menyesuaikan situasi dan agenda di lapangan, sehingga belum sepenuhnya mengikuti pola jadwal yang direncanakan. Pelaksanaan pelayanan juga sesekali menghadapi kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet dan pemeliharaan sistem dari pusat, meskipun kendala tersebut tidak terjadi secara dominan.

Penelitian mengenai inovasi pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Simanjuntak et al. (2025) membahas inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa inovasi pelayanan dilakukan melalui digitalisasi, layanan daring, dan jemput bola. Pelaksanaannya didukung oleh komitmen pimpinan, teknologi, anggaran, dan kerja sama lintas sektor. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur, dan literasi digital masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan tidak hanya bergantung pada bentuk layanan yang dikembangkan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya dan dukungan pelaksana.

Setyaramadani (2022) mengkaji inovasi *BALI NYATE* (*Bayi Lahir Nyangking Akte*) di Kabupaten Purworejo. Program ini mempermudah pengurusan akta kelahiran bayi melalui kerja sama dengan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut membantu menghemat waktu dan biaya serta mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. Meskipun demikian, sosialisasi program masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat diketahui lebih luas oleh masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya kerja sama antarlembaga dan penyampaian informasi dalam mendukung keberhasilan inovasi pelayanan.

Setyaramadani (2022) mengkaji inovasi *BALI NYATE* (*Bayi Lahir Nyangking Akte*) di Kabupaten Purworejo. Program ini mempermudah pengurusan akta kelahiran bayi melalui kerja sama dengan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut membantu menghemat waktu dan biaya serta mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan. Meskipun demikian, sosialisasi program masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat diketahui lebih luas oleh masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya kerja sama antarlembaga dan penyampaian informasi dalam mendukung keberhasilan inovasi pelayanan.

Ascarya dan Hertati (2024) meneliti efektivitas Program Jemput Bola Terpadu di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, terutama di desa dengan kepemilikan dokumen yang masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dinilai efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami persyaratan dokumen sehingga harus kembali untuk melengkapinya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan jemput bola juga berkaitan dengan kejelasan informasi dan kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi.

Zulfarayani et al. (2026) mengevaluasi Program *Lepat Ketan* (*Layanan Cepat Hari Sabtu*) di Kecamatan Padang Panjang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum konsisten setiap Sabtu. Keterbatasan dukungan anggaran, pengaturan operasional, koordinasi, dan rendahnya permintaan layanan turut memengaruhi pelaksanaannya. Jumlah layanan juga dilaporkan menurun dari 67 kasus pada 2024 menjadi satu kasus selama Januari–Mei 2025. Penelitian tersebut menekankan pentingnya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat dan dukungan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, inovasi pelayanan administrasi kependudukan dapat mempermudah akses masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi, sosialisasi, kesiapan masyarakat, dan konsistensi pelayanan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan inovasi dan berbagai kendala yang dapat muncul. Namun, penelitian ini berfokus pada dinamika pelaksanaan LELADI SESAMI di Kabupaten Madiun, khususnya pelayanan akhir pekan, penyesuaian jadwal melalui *Reboan*, dan pelayanan berdasarkan permohonan pemerintah desa. Aspek-aspek tersebut perlu dikaji secara bersamaan untuk memahami kebutuhan program, dukungan yang tersedia, proses pelaksanaan, serta hasil pelayanan yang dicapai.

Dalam perspektif kebijakan publik, Menurut Thomas R. Dye (2017) kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik berkaitan dengan pilihan pemerintah dalam menentukan tindakan untuk merespons persoalan publik. Pemahaman ini menjadi landasan konseptual untuk memahami kebijakan publik sebelum membahas bagaimana pelaksanaannya dievaluasi.

Evaluasi kebijakan publik dapat dikaji melalui pemikiran William N. Dunn (2003), yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria tersebut memberikan landasan untuk memahami aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai suatu kebijakan. Namun, penelitian Program LELADI SESAMI memerlukan kerangka yang dapat mengidentifikasi kebutuhan program, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process,* dan *Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam (2017) sebagai model evaluasi utama. Model CIPP dipilih karena menyediakan kerangka evaluasi yang sistematis untuk mengkaji kebutuhan dan tujuan program (*Context*), kesiapan sumber daya (*Input*), pelaksanaan program (*Process*), serta hasil yang dicapai (*Product*). Kerangka ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dasar kebutuhan program hingga hasil pelaksanaannya. Dengan demikian, CIPP digunakan sebagai kerangka utama untuk memahami

hambatan dan keberhasilan Program LELADI SESAMI, sedangkan pemikiran Dunn menjadi landasan konseptual dalam memahami evaluasi kebijakan publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi Program LELADI SESAMI sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki karakteristik pelayanan keliling, jadwal utama pada hari Sabtu dan Minggu, serta penyesuaian pelaksanaan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan wilayah. Berbeda dari penelitian terdahulu yang menekankan aspek tertentu, penelitian ini menggunakan empat dimensi CIPP untuk mengkaji kebutuhan program, sumber daya pendukung, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai secara terpadu. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun menghambat pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hambatan dan keberhasilan Program LELADI SESAMI di Kabupaten Madiun menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process,* dan *Product*). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program serta menjadi bahan pertimbangan bagi Dispendukcapil Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai hambatan dan keberhasilan pelaksanaan Program LELADI SESAMI di Kabupaten Madiun. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah melalui pengumpulan data secara mendalam (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun pada 27 Juli – 30 Agustus 2026.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan program. Sebanyak sembilan informan terlibat dalam penelitian ini, yaitu Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, staf tenaga administrasi Bidang Pencatatan Sipil, staf administrasi Bidang Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP), staf pengelola informasi administrasi kependudukan, serta lima masyarakat pengguna layanan LELADI SESAMI.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap pelaksanaan pelayanan. Data sekunder diperoleh dari Keputusan Kepala Dinas tentang LELADI SESAMI, laporan pelaksanaan program tahun 2024–2025, serta dokumentasi kegiatan.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak penyelenggara,

pelaksana pelayanan, dan masyarakat pengguna LELADI SESAMI. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumentasi. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memeriksa konsistensi informasi dan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan program.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Evaluasi Program LELADI SESAMI menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process,* dan *Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Zhang (2017) sebagai kerangka evaluasi utama. Keempat komponen tersebut digunakan sebagai indikator analisis untuk mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan pelaksanaan Program LELADI SESAMI di Kabupaten Madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Context

Dimensi *Context* digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan peluang yang melatarbelakangi pelaksanaan suatu program (Darnanengsih et al., 2026). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Program LELADI SESAMI dibentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan keliling pada hari Sabtu dan Minggu. Program ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen kependudukan pada hari kerja. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kependudukan yang menjadi latar belakang pelaksanaan program, berikut disajikan pada Tabel 2 data jumlah penduduk Kabupaten Madiun menurut kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
Kebonsari	59.370
Geger	65.268
Dolopo	59.753
Dagangan	52.378
Wungu	57.718
Kare	34.165
Gemarang	34.373
Saradan	70.922
Pilangkenceng	54.990
Mejayan	47.519
Wonoasri	35.652

Balerjo	44.408
Madiun	38.517
Sawahan	25.408
Jiwan	57.434
Kabupaten Madiun	**737.875**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun Dalam Angka 2025

Berdasarkan data tabel 2 tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2024 mencapai 737.875 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Besarnya jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Program LELADI SESAMI bermanfaat sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan keliling, sehingga warga memiliki alternatif untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus selalu datang ke kantor Dispendukcapil. Meskipun demikian, jumlah penduduk tidak secara langsung menunjukkan tingkat kebutuhan setiap wilayah, sehingga manfaat program juga perlu dilihat dari pelaksanaan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Dispendukcapil Kabupaten Madiun juga memberikan pelayanan melalui mekanisme *request by desa*. Mekanisme ini berawal dari permohonan pemerintah desa yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan permohonan tersebut, Dispendukcapil Kabupaten Madiun kemudian menindaklanjutinya dengan melaksanakan pelayanan di desa yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, request by desa menjadi salah satu mekanisme pelaksanaan pelayanan yang memungkinkan pemerintah desa mengajukan kebutuhan pelayanan kepada Dispendukcapil Kabupaten Madiun.

Selain itu, terdapat kegiatan Reboan, yaitu pelayanan pada hari Rabu sebagai pengganti jadwal pelayanan akhir pekan yang tidak dapat dilaksanakan. Penyesuaian ini dilakukan agar pelayanan administrasi kependudukan tetap dapat diberikan meskipun pelayanan pada hari Sabtu atau Minggu tidak memungkinkan untuk diselenggarakan. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan jadwal yang telah direncanakan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan.

Secara keseluruhan, evaluasi dimensi *Context* menunjukkan bahwa Program LELADI SESAMI relevan dengan upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari penyediaan layanan keliling, mekanisme *request by desa* yang menyesuaikan kebutuhan warga, serta *Reboan* sebagai alternatif untuk menjaga keberlangsungan pelayanan. Dengan demikian, program ini berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang lebih mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Input

Menurut (Stufflebeam & Zhang, 2017) evaluasi *Input* menilai ketersediaan sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Sejalan dengan itu, Alanshori et al. (2025) menjelaskan bahwa aspek Input mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi, serta dukungan operasional. Pada Program LELADI SESAMI di Kabupaten Madiun, aspek tersebut menjadi penting karena pelayanan dilakukan secara keliling dan membutuhkan kesiapan petugas serta fasilitas yang memadai.

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan LELADI SESAMI melibatkan 10 petugas yang menjalankan tugas sesuai kebutuhan pelayanan. Petugas tersebut mencakup bagian administrasi yang melakukan pendataan dan pemeriksaan berkas masyarakat pada tahap awal, serta petugas yang menangani perekaman dan pencetakan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pengurusan akta kelahiran dan akta kematian. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan jenis layanan, tetapi para petugas tetap dapat saling membantu apabila diperlukan. Seluruh petugas juga dinilai telah kompeten dan memahami berbagai jenis pengurusan administrasi kependudukan. Kondisi ini mendukung kesiapan sumber daya manusia karena petugas memiliki kemampuan untuk menangani beragam kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dari aspek anggaran, Program LELADI SESAMI didukung oleh anggaran operasional rutin Dispendukcapil Kabupaten Madiun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional program agar pelayanan keliling dapat dilaksanakan. Ketersediaan dukungan anggaran menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan, meskipun kecukupannya perlu dilihat berdasarkan kebutuhan operasional selama pelaksanaan pelayanan.

Pada aspek sarana dan prasarana, hasil observasi pelaksanaan LELADI SESAMI di Alun-Alun Caruban menunjukkan bahwa peralatan utama pelayanan telah tersedia. Fasilitas tersebut meliputi mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling, perangkat perekaman KTP-el, komputer atau laptop, serta peralatan pencetakan dokumen kependudukan. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara langsung di lokasi kegiatan. Namun, masih ditemukan kekurangan pada fasilitas pendukung bagi masyarakat yang mengantre. Belum tersedianya tempat duduk dan tenda yang menyebabkan masyarakat harus menunggu di area terbuka dan terpapar panas matahari, terutama ketika pelayanan berlangsung pada siang hari. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sarana pelayanan tidak hanya berkaitan dengan peralatan kerja petugas, tetapi juga perlu memperhatikan kenyamanan masyarakat selama mengakses layanan.

Dari aspek teknologi, pelaksanaan Program LELADI SESAMI bergantung pada koneksi internet dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terhubung dengan sistem pusat. Gangguan jaringan internet maupun maintenance SIAK dari pusat dapat menghambat proses pelayanan, terutama saat petugas melakukan penginputan dan pemrosesan data kependudukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelancaran pelayanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat, tetapi juga pada kestabilan jaringan dan akses terhadap sistem pusat yang digunakan selama pelayanan berlangsung.

Secara keseluruhan, kesiapan sumber daya Program LELADI SESAMI didukung oleh petugas yang kompeten, anggaran operasional dari APBD, serta ketersediaan peralatan utama untuk menunjang pelayanan keliling. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang perlu diperhatikan, terutama fasilitas bagi masyarakat yang mengantre dan kendala teknologi yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan. Dengan demikian, dari indikator Input, sumber daya utama program telah tersedia, tetapi dukungan fasilitas bagi masyarakat dan keandalan teknologi masih perlu ditingkatkan agar pelayanan dapat berlangsung secara lebih lancar dan nyaman.

Process

Dimensi *Process* digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, kesesuaiannya dengan rencana, dan kendala yang dihadapi (Rachmaniar et al., 2021). Menurut Stufflebeam & Zhang, (2017) evaluasi proses menilai pengelolaan program, hambatan pelaksanaan, serta konsistensi antara perencanaan dan praktik di lapangan. Pada Program LELADI SESAMI, evaluasi ini mencakup jadwal pelayanan, mekanisme request by desa, penentuan lokasi, dan kendala selama kegiatan berlangsung.

Salah satu aspek pelaksanaan program yang perlu diperhatikan adalah sebaran lokasi pelayanan. Untuk melihat perubahan pelaksanaan kegiatan selama 2024–2025, frekuensi pelayanan berdasarkan lokasi disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sebaran Lokasi Pelayanan LELADI SESAMI Tahun 2024–2025

Lokasi Pelayanan	2024	2025
CFD Caruban	16	9
Pasar Dolopo	6	10
Masjid Quba Caruban	6	14
Lapangan Jiwan	2	0
Lapangan Balerjo Kebonsari	2	0
Desa Gandul Pilangkenceng	1	0
Pasar Pagotan	1	0
Desa Nglanduk Wungu	1	0

Jatisari Geger	1	0
Sogo Balerjo	1	0
Sidorejo Saradan	1	0
Krebet Pilangkenceng	1	0
Desa Kepet Dagangan	1	0
Sareng Geger	0	2
Gunungsari Madiun	0	1
Tambakmas Kebonsari	0	1
Bukur Jiwan	0	1
Bantengan Wungu	0	1
Brumbun Wungu	0	1
Kresek Wungu	0	1
Mojopurno Wungu	0	1
Total Kunjungan Pelayanan	**40**	**42**
Jumlah Lokasi	**13**	**11**

Sumber: Data pelaksanaan Program LELADI SESAMI, 2024–2025

Berdasarkan Sebaran Lokasi Pelayanan LELADI SESAMI Tahun 2024–2025, jumlah kegiatan LELADI SESAMI meningkat dari 40 kegiatan pada 2024 menjadi 42 kegiatan pada 2025. Namun, peningkatan tersebut disertai perubahan frekuensi pelayanan di sejumlah lokasi. Pada 2024, CFD Caruban menjadi lokasi dengan kegiatan terbanyak, yaitu 16 kali. Sementara itu, pada 2025, frekuensi pelayanan tertinggi tercatat di Masjid Quba Caruban sebanyak 14 kali, diikuti Pasar Dolopo sebanyak 10 kali dan CFD Caruban sebanyak sembilan kali. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kegiatan meningkat, pelaksanaannya pada setiap lokasi mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara, CFD Caruban, Alun-Alun Caruban, dan Pasar Dolopo merupakan lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Tingginya kunjungan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pelayanan. Sebaliknya, pada beberapa lokasi lain, jumlah masyarakat yang datang cenderung lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons masyarakat turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, penentuan lokasi tetap perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah agar pelayanan tidak hanya terpusat pada lokasi yang ramai dikunjungi.

Selain penentuan lokasi, pelaksanaan LELADI SESAMI juga menggunakan mekanisme *request by desa*. Mekanisme ini diawali dengan pengajuan surat permohonan dari pemerintah desa kepada Dispendukcapil Kabupaten Madiun. Dalam surat tersebut, pemerintah desa dapat mengusulkan waktu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya, Dispendukcapil menindaklanjuti permohonan dengan menjadwalkan dan melaksanakan pelayanan secara langsung di

desa yang mengajukan permintaan. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk mengusulkan pelayanan berdasarkan kebutuhan warganya.

Dalam pelaksanaannya, jadwal pelayanan juga mengalami penyesuaian melalui *Reboan*, yaitu pelayanan yang dialihkan ke hari Rabu ketika terdapat agenda kedinasan atau kegiatan penting di kantor yang menyebabkan pelayanan pada hari Sabtu atau Minggu tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan data pelaksanaan, frekuensi *Reboan* meningkat dari 11 kegiatan pada 2024 menjadi 23 kegiatan pada 2025. Kondisi ini perlu diperhatikan karena SK Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Nomor 188/755/KPTS/402.101/2023 menetapkan jadwal pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan demikian, penyesuaian jadwal membantu menjaga keberlangsungan pelayanan, tetapi peningkatan frekuensi *Reboan* menunjukkan bahwa kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang telah ditetapkan masih perlu dievaluasi.

Dari sisi teknis, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan LELADI SESAMI sesekali mengalami gangguan jaringan internet dan *maintenance* sistem pusat yang dapat menghambat penginputan serta pemrosesan data kependudukan. Namun, kendala tersebut relatif jarang terjadi dan bukan merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, kestabilan jaringan dan akses terhadap sistem administrasi kependudukan tetap perlu dijaga untuk mendukung kelancaran pelayanan.

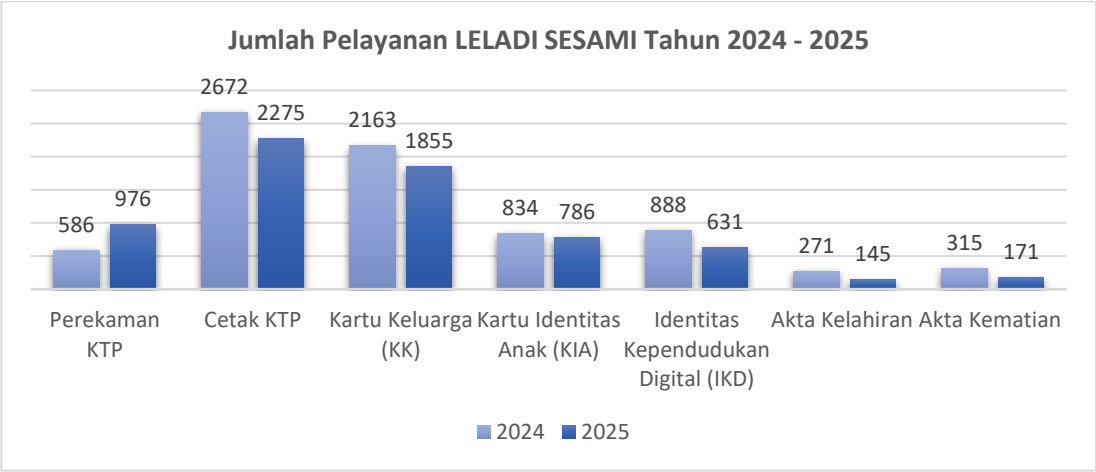
Secara keseluruhan, evaluasi dimensi *Process* menunjukkan bahwa pelaksanaan Program LELADI SESAMI didukung oleh mekanisme *request by desa* dan penyesuaian jadwal untuk menjaga keberlangsungan pelayanan. Namun, perubahan frekuensi pelayanan di setiap lokasi dan meningkatnya kegiatan *Reboan* menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penentuan lokasi perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, sedangkan penyesuaian jadwal perlu tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan program berjalan lebih konsisten

Product

Dimensi *Product* digunakan untuk menilai hasil yang dicapai Program LELADI SESAMI, baik berupa jumlah pelayanan maupun manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurut Stufflebeam & Zhang, (2017), evaluasi produk bertujuan mengetahui capaian program dan sejauh mana hasilnya mendukung tujuan yang telah ditetapkan.

Capaian Program LELADI SESAMI dapat dilihat melalui jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat selama tahun 2024–2025. Perbandingan jumlah pelayanan pada kedua tahun tersebut berdasarkan jenis layanan disajikan diagram gambar berikut.

Gambar 1. Jumlah Pelayanan LELADI SESAMI Tahun 2024–2025



Sumber: Data pelayanan Program LELADI SESAMI, 2024–2025.

Berdasarkan data Gambar 1 tersebut, jumlah pelayanan LELADI SESAMI menurun dari 7.729 pelayanan pada 2024 menjadi 6.839 pelayanan pada 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelayanan yang dihasilkan mengalami penurunan pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan jenis layanan, perekaman KTP meningkat dari 586 menjadi 976 pelayanan. Sebaliknya, pencetakan KTP menurun dari 2.672 menjadi 2.275 pelayanan, Kartu Keluarga (KK) dari 2.163 menjadi 1.855 pelayanan, Kartu Identitas Anak (KIA) dari 834 menjadi 786 pelayanan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari 888 menjadi 631 pelayanan, akta kelahiran dari 271 menjadi 145 pelayanan, dan akta kematian dari 315 menjadi 171 pelayanan.

Kesesuaian hasil dengan tujuan program. Program LELADI SESAMI bertujuan mempermudah masyarakat yang tidak dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan pada hari kerja. Berdasarkan data pelaksanaan, pada 2025 kegiatan pelayanan lebih banyak dilakukan pada hari Rabu dibandingkan Sabtu dan Minggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mencerminkan tujuan penyediaan pelayanan pada hari libur. Meskipun pelayanan tetap berlangsung melalui Reboan, pelaksanaan pada hari kerja berpotensi membatasi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen pada hari tersebut. Dengan demikian, keberlangsungan pelayanan belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian hasil dengan tujuan awal program.

Manfaat bagi Desa dan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Program LELADI SESAMI dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Melalui mekanisme request by desa, pemerintah desa

dapat mengajukan pelayanan sesuai kebutuhan warganya, terutama ketika terdapat kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Pelayanan ini membantu warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Mal Pelayanan Publik. Selain itu, pelayanan yang dilaksanakan langsung di desa membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, mekanisme request by desa menjadi salah satu bentuk pendekatan pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan di tingkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), Program LELADI SESAMI di Kabupaten Madiun menunjukkan keberhasilan dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Keberhasilan tersebut terlihat dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan petugas, anggaran operasional, dan peralatan pelayanan, serta adanya mekanisme *request by desa* yang memungkinkan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan warga. Masyarakat juga memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Mal Pelayanan Publik.

Di sisi lain, program ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang mengantre, seperti tempat duduk dan pelindung dari panas. Pada aspek *Process*, perubahan jadwal pelayanan ke hari Rabu (*Reboan*) menjadi perhatian karena jadwal utama dalam ketentuan program ditetapkan pada hari Sabtu dan Minggu. Meskipun penyesuaian tersebut dilakukan agar pelayanan tetap berlangsung ketika terdapat agenda kedinasan, peningkatan frekuensi Reboan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan jadwal.

Dengan demikian, Dispendukcapil Kabupaten Madiun perlu mempertahankan mekanisme request by desa, meningkatkan fasilitas pendukung bagi masyarakat, serta memperkuat konsistensi jadwal pelayanan. Langkah ini diharapkan dapat mempertahankan keberhasilan program sekaligus mengurangi hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan masyarakat dari wilayah yang lebih beragam dan membandingkan tingkat aksesibilitas pelayanan antarkecamatan. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perubahan jumlah pelayanan serta mengukur kepuasan masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan program agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dispendukcapil Kabupaten Madiun dalam meningkatkan pelaksanaan Program LELADI SESAMI. Perbaikan dapat difokuskan pada penyediaan fasilitas yang nyaman, penentuan lokasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan jadwal agar pelaksanaan program lebih terencana. Mekanisme *request by desa* perlu dipertahankan karena membantu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan warga. Selain itu, evaluasi jumlah pelayanan berdasarkan jenis dokumen, lokasi, dan waktu pelaksanaan dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas kegiatan selanjutnya.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa model CIPP dapat digunakan untuk mengevaluasi program pelayanan publik melalui empat dimensi, yaitu *Context, Input, Process,* dan *Product*. Keempat dimensi tersebut membantu mengidentifikasi kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kesiapan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang dicapai. Temuan bahwa peningkatan jumlah kegiatan tidak selalu diikuti peningkatan jumlah pelayanan juga menunjukkan pentingnya mengevaluasi proses dan hasil secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini menambah gambaran penerapan model CIPP dalam evaluasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis layanan keliling.

DEKLARASI PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Penulis menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu penyuntingan bahasa, perbaikan kalimat, dan penyusunan tulisan. Penggunaan AI tidak menggantikan proses pengumpulan, analisis, maupun interpretasi data penelitian. Penulis bertanggung jawab atas keakuratan data dan isi akhir naskah.

REFERENCES

Alanshori, M. Z., Maulidi, A., Zahidi, S., Kusaeri, K., & Suparto, S. (2025). The Application of the CIPP Evaluation Model in Educational Programs in Indonesia. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, *7*(2), 103–122. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i2.7390

Ascarya, P. G., & Hertati, D. (2024). Efektivitas Program Jemput Bola Terpadu sebagai Upaya Mempercepat Pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, *6*(2), 116–126. https://doi.org/10.36085/jmpkp.v6i2.6003

Darnanengsih, Mania, S., & Rasyid, M. N. A. (2026). Evaluation of the New Student Admission Program at IAIN Sorong Using the CIPP Model. *JISAE (Journal of Indonesian Student Assessment and Evaluation)*, *12*(1), 39–59.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy: Fifteenth Edition. In *Thomas R. Dye* (15th ed.).

INOVASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MADIUN MELALUI PROGRAM Keliling Melayani Adminduk Setiap Sabtu Dan Minggu (LELADI SESAMI), Pub. L. No. 188/755/KPTS/402.101/2023 (2023).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mozin, S. Y., Pakaya, I. P., Detuage, F., Samuel, A. R., & Tuna, M. R. (2026). Measuring Public Satisfaction in Public Services: A Simulation Study of Service Elements and IKM Measurement Methods. *International Journal of Social Science and Humanity*, *3*(1), 82–90. https://doi.org/10.62951/ijss.v3i1.619

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Details/111298/permendagri-no-19-tahun-2018

Rachmaniar, R., Yahya, M., & Lamada, M. (2021). Evaluation of Learning through Work Practices Industry Program at University with the CIPP Model Approach. *International Journal of Environment, Engineering and Education*, *3*(2), 59–68. https://doi.org/10.55151/ijeedu.v3i2.55

Salam, R. (2023). Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia. *ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES*, *6*(2), 439–452. https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i2.192

Setyaramadani, D. (2022). "BALI NYATE": INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN PURWOREJO. *Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi*, *19*(1), 79–89. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i1.53603

Shalsabella, A., Diandra Putri, A., & Hamida, N. A. (2025). Analysis of Mobiling Innovation Services at Batu City's Population and Civil Registration Department. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*, *3*(1), 56–71. https://doi.org/10.26905/j-tragos.v3i1.15358

Simanjuntak, J. C., Rachmatsyah, T. H., & Nenobais, H. N. (2025). INOVASI

PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG SELATAN. *(PAJ) Public Administration Journal*, *4*(2), 63–77. https://www.tangerangkota.go.id/

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. The Guilford Press.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.

Sumartini, R. S. S., Arifin, J., Abas, S., & Nursidi, D. (2024). IMPLEMENTASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RELEVANSI- NYA DENGAN KONSEP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM KONSEP NEGARA HUKUM. *Jurnal Yustitia*, 16–30. https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.243

Zulfarayani, E., Ria Ariany, & Roni Ekha Putera. (2026). Evaluation of the Implementation of the Saturday Fast Service Program (Lepat Ketan) as a Local Innovation in Padang Panjang Barat Subdistrict. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *9*(1), 236–245. https://doi.org/10.31334/4ytrj608